

PENGARUH UMP DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PBB DI KABUPATEN TRENGGALEK

Meyke Nurjanatik¹, Nur Aini Anisa²

meykenurjanatik28@gmail.com¹, nurainianisa.stiepemuda@gmail.com²

STIE Pemuda Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh UMP dan jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan yaitu data sekunder dari 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek, sedangkan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek. Upah Minimum Provinsi dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk.

Abstract

This research aims to determine the effect of the Minimum Wage and population on the acceptance of the Land and Building Tax in Trenggalek Regency, both partially and simultaneously. The data used is secondary data from 14 sub-districts in Trenggalek Regency. The sampling technique used purposive sampling with the method of multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the Provincial Minimum Wage partially does not have a significant effect on PBB revenue in Trenggalek Regency, whereas the population partially has a significant effect on PBB revenue in Trenggalek Regency. The Provincial Minimum Wage and the population simultaneously have a significant effect on PBB revenue in Trenggalek Regency.

Keywords: Land and Building Tax, Provincial Minimum Wage, Population.

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami peningkatan penduduk dari tahun ke tahun. Upaya buat mengelola jumlah penduduk tersebut yaitu dengan melibatkan kebijakan pemerintah yang dipergunakan untuk mengendalikan taraf kelahiran, mempertinggi akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan, dan mengelola migrasi. Upaya ini bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan nasional di Indonesia mengacu pada upaya pemerintah untuk mencapai kemajuan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan politik. Pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional tersebut mencari sumber dana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Dana yang berasal dari sumber non-migas dan migas dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan tersebut. Pembiayaan migas bukan merupakan sumber pendanaan yang dapat diandalkan oleh pemerintah karena cadangannya semakin menipis atau sumber pendanaannya semakin berkurang. Salah satu sumber pendanaan yang dapat diandalkan bagi pemerintah yang tidak bergantung pada gas dan minyak adalah pajak.

Nilai jual objek pajak dipengaruhi oleh beberapa hal yang berkaitan dengan kepemilikan, kondisi pasar dan faktor lainnya. Karena permintaan lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, maka permintaan juga dapat berdampak pada NJOP.

Kebutuhan lahan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tuntutan ini dapat menaikkan NJOP tanah apabila luas tanah bumi tetap, sehingga berdampak pada penerimaan PBB.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi dan jumlah penduduk pada penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupaten Trenggalek periode 2020 sampai dengan 2022, dengan manfaat mampu meningkatkan dasar penilaian yang berguna bagi pemerintah mengenai penerimaan PBB, memberikan pemahaman akuntansi dalam bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian.

KAJIAN TEORI

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

PBB merupakan pemasukan kas negara yang diperoleh dari masyarakat atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Sebagian besar pendapatan dari jenis pajak ini dialokasikan ke berbagai daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut (Refi Handayani, 2017, p. 23). Menurut Sihombing (2012), NJKP ditentukan sebesar 20% hingga 100% dari NJOP berfungsi sebagai dasar guna menentukan PBB. Adapun landasan perhitungan untuk objek PBB meliputi :

- a) NJOP untuk sasaran pajak perkebunan dikenakan sebesar 40%.
- b) NJOP pajak kehutanan dikenakan sebesar 40%.
- c) NJOP pajak pertambangan dikenakan sebesar 40%.
- d) Tambahan objek pajak desa dan kota yaitu :
- e) Jika NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,- dikenakan tarif sebesar 40%.
- f) NJOP dikenakan sebesar 20% apabila di bawah Rp 1.000.000.000,-.
- g) Tarif PBB dikenakan sebesar 0,5%.

2. Jumlah penduduk

Menurut Kosasi and Barus (2018, 121), penduduk adalah seseorang yang tinggal di wilayah NKRI dalam jangka waktu enam bulan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat namun berniat untuk menetap. Penentuan status sebagai penduduk juga didasarkan pada faktor-faktor seperti umur, status perkawinan, jumlah anak yang lahir, jumlah anak hidup, dan tempat lahir. Faktor laju pertumbuhan penduduk menurut Suparmoko dalam Silastri (2017, 109) yaitu angka kelahiran, angka kematian, dan angka migrasi atau mobilitas penduduk.

3. Upah Minimum Provinsi

Menurut Permenakertrans No. 7 tahun 2013 pasal 1 angka 2 UMP merupakan upah minimum yang diterapkan di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Menurut (Indriani, 2019) Indonesia menetapkan upah minimum setiap tahun berdasarkan persyaratan penghidupan yang adil dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan produktivitas. Kebutuhan fisik bagi pekerja selama sebulan dianggap sebagai standar hidup yang layak. Gubernur menetapkan upah minimum di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa data penerimaan PBB yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik serta teknik pengambilan sampel penelitian adalah purposive sampling.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan SPSS versi 23. Teknik analisis

data yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu penyajian data berupa ukuran, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Penelitian ini juga menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan uji f yang bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum. Berikut hasil dari statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

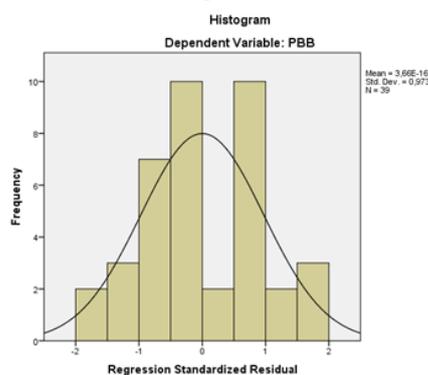
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMP	39	1768777	1891567	1843040,33	54027,120
Jumlah Penduduk	39	26028	79890	51607,82	14907,977
Penerimaan PBB	39	360953130	1672803756	912616062,13	347111885,947
Valid N (listwise)	39				

Sumber : olah data SPSS

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penelitian ini menggunakan 39 sampel dari populasi yang ada. Pada penerimaan PBB memiliki angka mean sebesar Rp. 912.616.062,13; nilai maksimum sebesar Rp. 1.672.803.756; angka minimum sebesar Rp. 360.953.130; dan angka standar deviasi mencapai Rp 347.111.885,947. Pada variabel UMP, nilai rata-rata adalah Rp. 1.843.040,33; nilai maksimum Rp. 1.891.567; nilai minimum Rp. 1.768.777; dan nilai standar deviasi Rp 54.027,120. Pada variabel jumlah penduduk memiliki nilai rata-rata yaitu 51607,82; nilai maksimum 79890; nilai minimum 26028; dan angka standar deviasi sebesar 14907,977.

Uji Nnormalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal, seperti yang ditunjukkan pada tabel dan gambar berikut:



Sumber : olah data SPSS

Dari grafik tersebut terlihat bahwa residual menunjukkan distribusi normal dan simetris, tanpa adanya kemiringan ke kanan maupun kiri.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		39
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000001
	<i>Std. Deviation</i>	212964783,95879600
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,136
	<i>Positive</i>	0,101
	<i>Negative</i>	-0,136
<i>Test Statistic</i>		0,136
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,065 ^c

- a. *Test distribution is Normal.*
- b. *Calculated from data.*
- c. *Lilliefors Significance Correction.*

Sumber : olah data SPSS

Sumber : olah data SPSS

Menurut tabel tersebut, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar (0,065) > (0,05), yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Coefficients^a

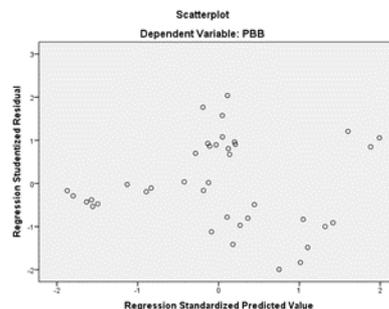
Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 UMP	1,000	1,000
1 PENDUDUK	1,000	1,000

a. *Dependent Variable: PBB*

Sumber : olah data SPSS

Mengacu dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai tolerance sebesar (1,000) > (0,1) dan nilai VIF sebesar (1,000) < 10, yang berarti tidak ada hubungan antar variabel dalam model regresi tersebut.

Uji heteroskedastisitas



Sumber : olah data SPSS

Mengacu tabel tersebut menyatakan bahwa titik tidak mengikuti pola yang tetap (melebar, menyempit, atau bergelombang).

Uji autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,790 ^a	0,624	0,603	218800516,062	1,465

a. *Predictors: (Constant), PENDUDUK, UMP*

b. *Dependent Variable: PBB*

Sumber : olah data SPSS

Pada tabel tersebut terlihat bahwa angka DW = 1,465; dengan k = 2; n = 39; nilai DU = 1,5969; dan nilai DL = 1,3821 yang menunjukkan angka DW terletak di antara nilai DU dan DL berarti autokorelasi tidak meyakinkan (inconclusive). Maksud dari autokorelasi tidak meyakinkan (inconclusive) yaitu nilai durbin watson yang diperoleh tidak dapat disimpulkan dengan pasti apakah ada atau tidaknya autokorelasi residual model regresi. Jika hasilnya tidak meyakinkan, sehingga dilakukan pengujian run test.

<i>Runs Test</i>	
<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>Test Value^a</i>	-33982305,81826
<i>Cases < Test Value</i>	19
<i>Cases >= Test Value</i>	20
<i>Total Cases</i>	39
<i>Number of Runs</i>	20
<i>Z</i>	0,000
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	1,000

a. Median

Sumber : olah data SPSS

Dari tabel tersebut diketahui bahwa angka sig 1,000 > 0,05 artinya tidak ada gejala autokorelasi.

Regresi linier berganda

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	-		-	
		1207228031,576	1215678799,352	0,993	0,327
	UMP	640,542	657,059	0,100	0,975
	Jumlah Penduduk	18200,710	2381,210	0,782	7,643
				0,000	

a. *Dependent Variable: Penerimaan PBB*

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta bernilai negatif sebesar (-1.207.228.031,576) artinya jika UMP (X1) dan jumlah penduduk (X2) bernilai nol, maka angka penerimaan PBB akan berada di sekitar -1.207.228.031,576. Namun nilai ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena sig = 0,327 > 0,05.

Variabel UMP memiliki nilai sebesar 640,542 artinya setiap kenaikan satu unit UMP akan meningkatkan penerimaan PBB sebesar 640,542. UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap PBB karena angka sig = 0,336 > 0,05. Jumlah penduduk mempunyai nilai sebesar 18.200,710 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit jumlah penduduk akan meningkatkan penerimaan PBB sebesar 18.200,710. Nilai signifikansi

jumlah penduduk sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh pada penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek.

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan membandingkan angka t-hitung dan t-tabel yang tercantum dalam tabel coefficients.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1290469474,259	1777074336,995		-0,726	0,472
UMP	612,083	960,154	0,072	0,637	0,528
Jumlah Penduduk	22123,625	3518,355	0,707	6,288	0,000

a. *Dependent Variable*: Penerimaan PBB

Sumber : olah data SPSS

Pada variabel UMP, angka t-hitung (0,637) < t-tabel (1,697) dan nilai signifikansi (0,528) > (0,05), sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak. Ini menunjukkan bahwa secara individu UMP tidak berpengaruh pada penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek.

Pada variabel jumlah penduduk, nilai t-hitung (6,288) > t-tabel (1,697) dan nilai signifikansi (0,000) < (0,05), maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini menunjukkan bahwa secara individu jumlah penduduk berpengaruh pada penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek.

Uji f

Pengujian ini digunakan untuk menilai sejauh mana dampak variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan membandingkan nilai f-tabel dan f-hitung yang tercantum dalam tabel anova.

Tabel 4.13

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	4412788668854050000	2	220639433442703000	20,04	,000
	,000		0,000	1	^b
<i>Residual</i>	429369519590590000	39	110094748612972000		
	0,000		,000		
Total	870648386475996000	41			
	0,000				

a. *Dependent Variable*: Penerimaan PBB

b. *Predictors*: (Constant), Jumlah Penduduk, UMP

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai f-hitung (20,041) > f tabel (3,267) dan nilai signifikansi (0,000) < (0,05), sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama jumlah penduduk dan UMP memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, diterapkan analisis regresi linier berganda dengan metode pengumpulan data studi dokumen yang diperoleh dari populasi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Temuan dari penelitian ini adalah :

- a. UMP tidak memiliki pengaruh signifikan pada penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa variasi UMP tidak memiliki keterkaitan secara signifikan pada perubahan pendapatan PBB di Kabupaten Trenggalek.
- b. Jumlah penduduk memiliki pengaruh pada penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek. Adapun indikator yang mempunyai pengaruh kuat yaitu pertumbuhan penduduk, dimana kenaikan jumlah penduduk setiap tahun mengalami kenaikan yang berpotensi menambah penerimaan PBB.
- c. UMP dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh pada penerimaan PBB di Kabupaten Trenggalek. Indikator yang mempunyai pengaruh kuat yaitu daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan UMP yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan pendapatan, yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli lahan dan bangunan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, D. (2019). PENGARUH UPAH MINIMUM DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122–130.
- KEMNAKER. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 1–69. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/7_Tahun_2013.pdf
- Kosasi, J., & Barus, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(2), 119–128. <https://doi.org/10.55601/jwem.v7i2.524>
- Refi Handayani. (2017). Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Sihombing, S. (2012). Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). In Habonaron Do Bona (Vol. 1, pp. 22–26).
- Silastri, N. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fekon*, 4(1), 105–117.